

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Muchaddam Fahham dan Anih Sri Suryani, *Pembangunan Sosial dan Lingkungan*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Didi Muslim Sekutu, *Penguatan Kelembagaan MPR Sebagai Pengemban Aspirasi Rakyat dan Daerah*, CV. Al Qalam Media Lestari, Pati, 2018.
- Hamid S. Attamimi, dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*” Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Imam Mahdi, *Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Muh Hasrul, Fajlurrahman Jurdi, Ahmad Yani, *Hukum Kelembagaan Negara (Penguatan Lembaga Negara Dalam Konstitusi)*, Litera, Yogyakarta, 2019.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cetakan Ke-2), Kencana, Jakarta, 2017.
- Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori Dan Aplikasi*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cetakan Ke-16), Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Purnadi Purbacaraka, dkk, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pmbangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.

### **Jurnal**

Bayu Dwi Anggono, *Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 4, Desember 2019.

Muh. Hasrul, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*, Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017.

Muhammad Akram, Abdul Razak dan Aminuddin Ilmar, *Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Kendari*, diakses dalam unhas.ac.id, tanggal 10 Oktober 2020.

Wahyu Nugroho dan Agus Surono, *Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol.4 Issue 2, Februari 2018.

### **Internet**

Mirwansyah Prawiranegara, *Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota*, Modul Elektronik, [www.pustaka.ut.ic](http://www.pustaka.ut.ic).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a84ed465a100/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum/>

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/43-puslitbang-kumdil/dok-keg-litbang/764-kewenangan-uji-materiil-peraturan-perundang-undangan-di-bawah-undang-undang.html>,

<https://kbbi.web.id>

### **Lain-lain**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional.

Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional.

Bab III Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

Bab I Lampiran Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2014